

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Republik Turki dikenal sebagai negara transkontinental karena memiliki batas wilayah lebih dari satu benua yakni Eropa dan Asia atau disebut juga dengan Eurasia. Turki terletak di persimpangan Balkan, Kaukasus, Timur Tengah, dan Mediterania Timur. Turki merupakan salah satu negara di kawasannya yang memiliki teritorial dan populasi yang besar serta memiliki wilayah daratan yang lebih luas daripada negara Eropa lainnya. Wilayah Turki di utara dibatasi oleh Laut Hitam, di timur laut berbatasan dengan Georgia dan Armenia, di sebelah timur dengan Iran dan Azerbaijan, dan di Tenggara berbatasan dengan Irak dan Suriah. Posisinya yang berbatasan langsung dengan beberapa negara timur tengah lainnya membuat Turki secara tidak langsung kerap turut andil dalam konflik yang terjadi di sekitar wilayahnya, salah satunya yaitu konflik perang sipil Suriah.

Perlu diketahui bahwa perang sipil Suriah merupakan perang saudara yang terjadi di Suriah dan telah berlangsung sejak Maret 2011. Pada saat itu pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad mendapati protes pro-demokrasi yang cukup besar di seluruh negeri. Para pengunjuk rasa menuntut turunnya rezim otoriter Assad yang telah lama memimpin Suriah yakni sejak ayah dari Bashar al-Assad, Hafez al-Assad menjadi presiden Suriah pada tahun 1971. Pemerintah Suriah menggunakan kekerasan untuk menekan demonstrasi tersebut, Assad juga menggunakan polisi, militer, dan pasukan paramiliter secara ekstensif. Milisi oposisi pun mulai terbentuk pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 konflik ini telah berkembang menjadi perang sipil. Krisis yang terjadi di Suriah ini berakar dari konflik-konflik kecil yang terjadi di dalam negeri Suriah seperti kurangnya distribusi pangan dan tingkat pengangguran yang tinggi, kesenjangan sosial, serta dominasi partai tunggal yaitu Ba'ath yang lama berkuasa di Suriah (Kompas, 2020). Rezim Assad terkenal dengan pemerintahannya yang otoriter dan telah memimpin Suriah selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Kemudian, konflik ini juga tidak lepas dari fenomena Arab Spring yang mulai muncul pada tahun 2010 dan menjalar ke Suriah pada tahun 2011.

Fenomena *Arab Spring* ini merupakan gerakan revolusioner yang muncul akibat banyaknya rezim-rezim otoriter yang opresif dan menindas di kawasan Timur Tengah

(Blakemore, 2019). Dengan dorongan dari gerakan *Arab Spring* ini, lahirlah gerakan-gerakan revolusioner Suriah yang melawan pemerintah otoriterinya Bashar al-Assad. Kondisi politik di Suriah yang tidak stabil melahirkan kubu-kubu yang mendukung berjalannya konflik ini serta golongan-golongan revolusioner lainnya di berbagai kota Suriah. Selain kubu-kubu yang muncul dari dalam negeri, muncul pula beberapa kelompok oposisi yang memanfaatkan kondisi tersebut seperti ISIS, Jabhar al-Nushra dan beberapa negara barat yang saling berebut kepentingan (Prabowo, 2020).

Pada awalnya, pemerintah Turki diketahui tidak terlibat secara langsung pada konflik Suriah. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya Turki memilih untuk terlibat dengan mendukung Tentara Pembebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA) yang menjadi oposisi dari Assad dengan menyuplai kendaraan tempur untuk digunakan militer Turki bersama dengan FSA serta mengirim angkatan militer untuk memperkuat pasukan di perbatasan Turki-Suriah. FSA berisikan warga sipil dan beberapa tentara Suriah yang membelot dari pemerintahan. FSA dianggap sebagai kelompok yang menyatukan beberapa kelompok kecil perlawanan lainnya secara kolektif dan bertujuan untuk mengimbangi kekuatan militer Suriah yang jelas jauh lebih kuat ketimbang kekuatan warga sipil biasa (Lister, 2016).

Turki dan Suriah memiliki konflik berkepanjangan sebelum konflik perang sipil ini muncul yakni pada tahun 1999 lalu saat ayah dari Assad yang menjadi pemimpin Suriah pada saat itu mendukung Kurdi untuk masuk ke dalam pemerintahannya dan sejak itu hubungan kedua negara tersebut renggang. Suku Kurdi merupakan suku terbesar di Timur Tengah yang tidak bisa memiliki negara sendiri sejak Perang Dunia I, lalu akhirnya tersebar di beberapa negara Timur Tengah dan salah satunya Turki. Karena tersebar di berbagai negara tersebut, Kurdi sebagai minoritas kerap mendapati perlakuan represif dari pemerintah dan akhirnya membentuk kelompok milisi sendiri yakni Partai Pekerja Kurdi yang selanjutnya disebut sebagai PKK dan kelompok ini menuntut kemerdekaan dari Turki. Pada tahun 1980 terjadi konflik besar antara PKK dan pemerintah Turki yang pada akhirnya PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki. Pada saat konflik perang sipil Suriah terjadi, Turki meyakini bahwa Suriah memiliki hubungan dengan PKK melalui Yekîneyên Parastina Gel atau Unit Perlindungan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai YPG yang mengontrol Suriah Barat Laut di mana lokasi konflik berada yakni Aleppo dan Idlib (Abrar, Mengapa Turki Menyerang Suriah?, 2020). Secara domestik, Turki telah menggunakan konflik Suriah sebagai dalih untuk

menekan hak-hak orang Kurdi yang tinggal di Turki dan membatasi perwakilan parlemen mereka untuk mengamankan reformasi konstitusi penting pada tahun 2017 (Siccardi, 2021).

Turki yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah konflik Suriah yakni Aleppo dan Idlip membawa dampak yang cukup besar. Pecahnya perang sipil Suriah mengakibatkan beberapa warga sipilnya kehilangan tempat tinggal bahkan kamp-kamp daruratnya pun terpaksa mereka tinggalkan karena sudah tidak aman lagi. Warga Suriah pun akhirnya harus mencari perlindungan ke negara-negara tetangganya sehingga Turki menjadi tujuan utama bagi para pengungsi Suriah karena lokasi konflik yang sangat dekat bahkan berbatasan langsung dengan wilayah Turki. Konflik terkait pengungsi ini meluap pada tahun 2020 di mana Turki menjadi negara yang menampung jumlah pengungsi Suriah terbanyak yakni hampir 4 juta pengungsi (Szmigiera, 2021). Dalam pandangan Erdogan, Turki saat ini sudah tidak dapat menerima pengungsi lagi karna sudah ada reaksi cukup besar dari dalam negeri Turki terhadap para pengungsi dan juga kondisi ekonomi Turki yang sedang tidak baik-baik saja (Kirby, 2020).

Selain dampak dari para pengungsi tersebut, Turki juga merasa khawatir akan dampak yang dirasakan oleh warganya yang bertempat tinggal di dekat perbatasan Turki-Suriah karena sangat memungkinkan keselamatan warga Turki ataupun pengungsi Suriah di daerah perbatasan akan terancam. Faktor-faktor tersebut yang menjadi alasan Turki melakukan berbagai upaya berupa intervensi militer seperti mengirim pasukan militernya ke perbatasan, juga mengirim bantuan terhadap FSA guna mempertahankan wilayah kedaulatan Turki melalui pengamanan ketat di perbatasan dengan tujuan untuk melindungi warga serta kedaulatan negaranya agar dampak dari perang tersebut tidak semakin besar dirasakan oleh Turki.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa dikarenakan lokasi geografis Turki yang berdekatan dengan tempat konflik Suriah, menjadikan keamanan nasional Turki terancam dan perlu untuk merespon ancaman tersebut. Sehingga, penulis kemudian menulis rumusan masalah penelitian, yaitu **“Bagaimana Upaya Turki Untuk Merespon Ancaman Keamanan Nasional Akibat Adanya Perang Sipil Suriah Tahun 2015-2020?”**

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Teori merupakan kumpulan asumsi, konsep, konstruk, dan preposisi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis dan harus terbukti kebenarannya. Penggunaan dan pengaplikasian teori menjadi sangat penting karena dapat mengungkapkan dan membuktikan atas jawaban dari suatu kejadian dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan, sampai meramalkan.

#### 1.3.1 Konsep *National Security*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keamanan adalah situasi yang aman dan tentram (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Kemudian secara umum keamanan nasional merupakan upaya suatu negara dalam menjaga wilayah teritorial kekuasaannya dari ancaman dalam ataupun luar negeri. Menurut Alan Collins, keamanan nasional merupakan suatu kebutuhan yang bertujuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan suatu bangsa melalui diplomasi di berbagai bidang seperti politik, militer, dan ekonomi. Hal ini sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjaga dan mempertahankan keamanan nasionalnya di mana hal ini juga memiliki nilai saing dengan negara lain. Upaya-upaya yang dilakukan seperti melindungi informasi rahasia suatu negara yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut yakni informasi terkait militer seperti persenjataan ataupun strategi dalam berdiplomasi dengan negara bangsa lain (Collins, 2003).

Sedangkan menurut Barry Buzan, dewasa ini hubungan antar negara memberikan dampak positif namun di sisi lain juga dapat mengancam keamanan nasionalnya karena bagi Buzan masalah-masalah keamanan nasional datang dari hubungan antar negara tersebut. Terdapat dua istilah yang sering dipakai jika membahas keamanan yakni *threats* (ancaman) dan *vulnerability* (kerentanan). Dalam penerapan strategi keamanan, suatu negara harus memperhitungkan aspek-aspek *threats* dan *vulnerability* tersebut karena dua istilah ini berbeda namun memiliki keterkaitan yang cukup erat dalam perwujudan keamanan nasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika sebuah ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara dapat dicegah maka tingkat *vulnerability* suatu negara dapat berkurang. Oleh karena itu, kapabilitas yang dimiliki suatu negara sangat memengaruhi aspek *threats* dan *vulnerability* negara tersebut (Buzan, People, States and

Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era. Second Edition, 1991).

Dalam hal ini, pada aspek *threats*, perang sipil yang terjadi di Suriah membawa dampak yang cukup rumit dan menjadi sebuah ancaman bagi keamanan nasional Turki. Kemudian, pada aspek *vulnerability*, respon yang diberikan Turki terhadap dampak yang terjadi dapat mengurangi tingkat kerentanan negaranya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa respon atas adanya ancaman tersebut menjadi sebuah upaya bagi Turki untuk mengurangi kerentanan tersebut demi menjaga dan mempertahankan keamanan nasionalnya.

### **1.3.2 Teori *Pre-emptive Strike/ Striking First***

Terdapat beberapa pendapat terkait *pre-emptive*, namun secara garis besar *pre-emptive strike* dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara sebagai respon terhadap ancaman dari negara lain dengan tujuan untuk mengurangi ancaman ataupun dampak yang akan dirasakan dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, *pre-emptive strike* merupakan strategi untuk menyerang lebih dulu negara lain dengan menggunakan kekuatan militer tanpa adanya deklarasi perang.

Sebelum Piagam PBB dibentuk, tindakan *pre-emptive* ini dianggap wajar di mata internasional selagi masih memiliki bukti konkrit bahwa negara yang melakukan tindakan tersebut terancam keamanannya dan mendapatkan *imminent threat* atau ancaman nyata dari negara lain. Pasca Piagam PBB dibentuk, *pre-emptive strike* ini masih kerap dipraktikkan oleh beberapa negara di dunia atas dasar *self defense* atau perlindungan diri. Dalam piagam PBB pasal 51, diatur mengenai *self-defense* namun tidak secara spesifik menyebutkan *pre-emptive strike* karena pada dasarnya *self-defense* berbeda dengan tindakan *pre-emptive* namun masih ada beberapa negara yang melakukan *pre-emptive strike* beralaskan *self-defense* dengan tujuan melindungi kedaulatan negaranya dari ancaman negara lain. (Makalew, 2019).

Dalam kasus ini melalui teori *pre-emptive strike*, Turki mendapatkan *imminent threat* atau ancaman nyata dari adanya perang sipil yang terjadi di Suriah karena lokasi perang yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Turki sehingga Turki melakukan beberapa upaya seperti pendekatan secara diplomatis berupa himbauan berisi anjuran untuk

meminta Presiden Assad menghentikan tindak kekerasan kepada warganya oleh Menteri Luar Negeri Turki pada saat itu Ahmet Davutoğlu. Selain itu Turki juga melakukan intervensi militer terhadap Suriah sebagai bentuk *self-defense* atau perlindungan diri dari ancaman yang ada. Turki mengirim pasukan militernya ke perbatasan serta mengirim bantuan militer pada FSA guna mempertahankan wilayah kedaulatan Turki melalui pengamanan ketat di perbatasan dan juga agar dampak dari perang Suriah ini tidak semakin besar dirasakan oleh Turki.

#### **1.4 Hipotesa**

Upaya Turki dalam mengantisipasi ancaman keamanan nasional akibat adanya perang sipil Suriah adalah:

1. Melakukan *pre-emptive strike* berupa serangan militer ke Suriah guna mempertahankan wilayah kedaulatan Turki serta meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap Turki;
2. Memberikan bantuan militer kepada FSA sebagai tahap awal Turki dalam merespon perang sipil Suriah.
3. Melakukan pendekatan secara diplomatis dengan mengirim menteri luar negeri Turki ke Suriah

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, menganalisa, dan mendeskripsikan bagaimana upaya Turki untuk merespon ancaman keamanan nasional akibat adanya perang sipil Suriah tahun 2015-2020.

#### **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa strategi Turki dalam merespon ancaman keamanan nasional terhadap perang sipil Suriah tahun 2015-2020. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Menurut Bogan dan Taylor (2016), pendekatan kualitatif mengacu pada metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif—kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016). Metode kualitatif-deskriptif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang

memanfaatkan data tambahan yang diperoleh melalui buku, jurnal, *website*, surat kabar, maupun tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian kualitatif-deskriptif ini berfokus pada mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi.

### **1.7 Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, maka adapun fokus penelitian jangkauan penelitian mengenai “**Upaya Turki untuk merespon ancaman keamanan nasional akibat adanya perang sipil Suriah**” dimulai dari tahun 2015 sampai 2020.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, yaitu:

**Bab I**, bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II**, bagian ini membahas tentang perang sipil di Suriah serta dinamika hubungan antara Turki dan Suriah.

**Bab III**, bagian ini membahas tentang upaya-upaya Turki dalam merespon perang sipil Suriah sepanjang tahun 2015-2020 yang mana akan terbagi ke dalam sub bab berikut;

1. Melakukan *pre-emptive strike* berupa serangan militer ke Suriah;
2. Memberikan bantuan militer kepada FSA;
3. Melakukan pendekatan secara diplomatis.

**Bab IV**, pada bagian ini sebagai penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dari temuan yang ada dalam tugas akhir ini.